

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Republika	Kompas	Radars Kudus	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Kudus

Halaman 8

## PBB Nunggak Rp8 M

KOTA - Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode 2008 - 2012 belum selesai. Rupanya Pemkab masih nunggak Rp 8 miliar. Ini terjadi setelah pengelolaan pajak dialihkan dari KPP Pratama kepada Pemkab Kudus.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, nilai tunggakan yang menjadi sasaran verifikasi mencapai Rp 9,9 miliar. "Setelah kami verifikasi

ternyata berkurang dan menjadi Rp 8 miliar," katanya kemarin.

Sampai saat ini, verifikasi masih dilakukan. Sebab verifikasi harus sesuai dengan *by name by address*. Sementara data yang didapatkan hanya global. Untuk mendapatkan data detail, pihaknya berencana berkoordinasi dengan KPP Pratama Kudus.

Dia menambahkan, tunggakan ini bisa dihapuskan dari neraca. Namun penagihan tetap dilakukan dan nantinya masuk di tagihan

lain-lain. "Untuk menghapus juga butuh nama dan alamat pemilik objek pajak," terangnya.

Kabid Pendapatan Fiza Akbar mengatakan, tunggakan PBB masih diupayakan agar bisa dituntaskan. Caranya dengan melakukan validasi terhadap semua objek pajak yang menjadi sasaran. Kerjasama dengan KPP Pratama Kudus akan dilakukan, termasuk pengecekan data penunggak melalui online.

Untuk jumlah wajib pajak yang menjadi sasaran validasi tunggakan

jumlahnya ratusan ribu, nilai tunggakannya bervariasi. Tunggakan pajak tersebut, merupakan tunggakan pajak saat masih dikelola oleh pusat melalui KPP Pratama Kudus.

Jika melihat berkas pelimpahan pengelolaan PBB dari KPP Pratama, nilai tunggakan mencapai Rp 19 miliar. Namun, berdasarkan data aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop) yang menjadi pedoman administrasi PBB saldo uang hanya Rp 11 miliar. Artinya ada selisih.

Khusus untuk tunggakan senilai Rp 11 miliar disertai data nama dan alamat. Selebihnya tidak disertai. Setelah dilakukan penelusuran akhirnya diperoleh 169.000 wajib pajak yang perlu diverifikasi terkait tunggakan ini.

Pihaknya pernah menyampaikan surat konfirmasi tunggakan PBB tahun 2008 hingga 2012. Penyampaian surat konfirmasi ini disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). (lis/mal)